Strategi UHC Kota Bandung

Dinkes Kota Bandung

Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk
(Universal Health Coverage)

Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia.

TUJUAN JKN AGAR MASYARAKAT DAPAT MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS TANPA MENEMUI HAMBATAN FINANSIAL YANG BERARTI

Alur kepesertaan JKN Kota Bandung

- .

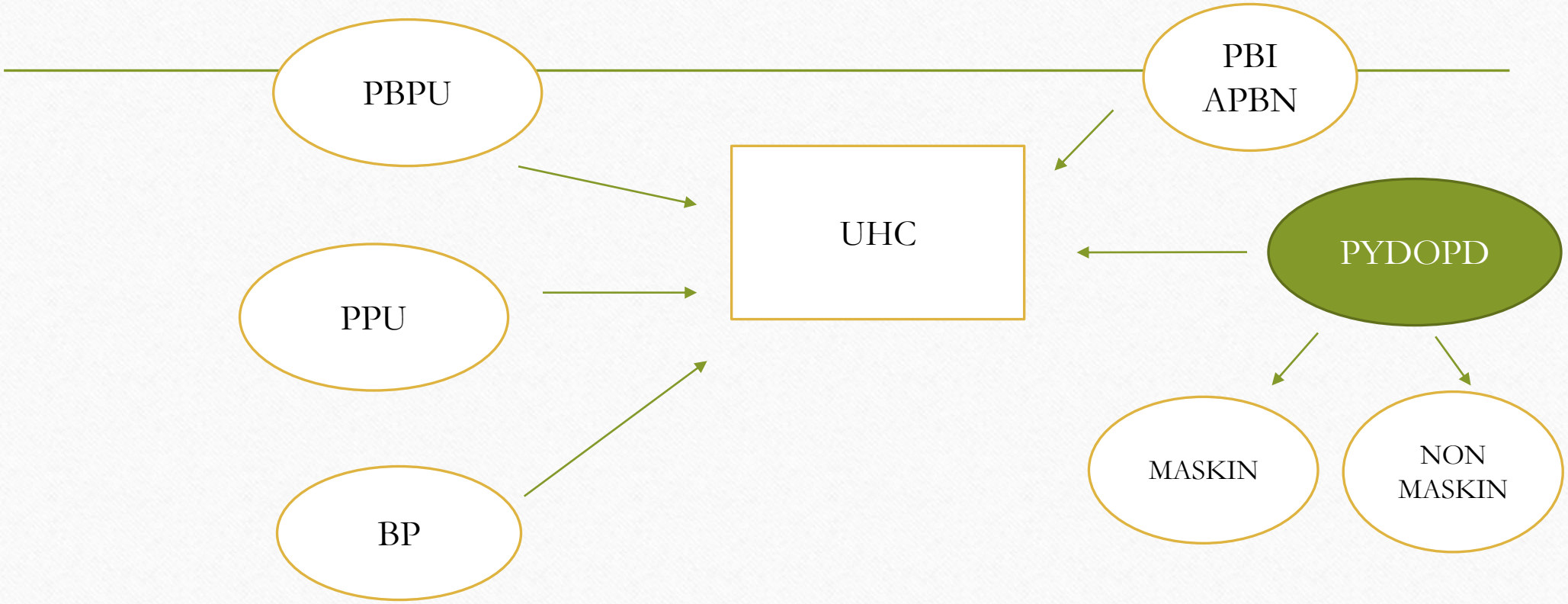

Kondisi UHC Kota Bandung

Tahun	Persen	Keterangan
Januari 2018	95 %	Migrasi kepesertaan posisi awal 92%
Januari 2019	99 %	Des 2019 turun 94,72 %
		Penurunan karena penonaktifan PBI APBN, cleansing data PBI APBD penambahan jumlah penduduk Kota Bandung
Januari 2020	95,78 %	Migrasi kepesertaan 14.000
November 2020	94,57 %	Terjadi penurunan karena adanya penonaktifan peserta PPU dari pusat karena data tidak valid

Ancaman UHC 95 %

- Penonaktifan PBI APBN oleh Pusat
- Cleansing data PBI APBD
- Pengalihan peserta PBPU aktif/menunggak ke PYDOPD membebani anggaran dan tidak ada daya ungkit terhadap UHC
- Penambahan jumlah penduduk karena perpindahan ke Kota Bandung dan belum punyaJKN berdampak penurunan dashboard UHC

Kesiapan anggaran Pemkot Bandung

No	Tahun	PAGU anggaran APBD	PAGU anggaran Banprov
1	2018	110.034.288.500	29.678.169.600
2	2019	137.378.816.014	24.402.108.991
3	2020	177.999.999.660 57.334.741.280	19.650.311.510

Kelebihan UHC

- Masyarakat Kota Bandung mempunyai jaminan kesehatan
- Mudah untuk mengakses layanan kesehatan ketika sakit
- Pemkot dapat mendaftakan masyarakat sakit yang belum punya jaminan langsung aktif tanpa menunggu 14 hari

Permasalahan UHC

- Dashboard UHC turun karena berbagai sebab yang berdampak terhadap beban anggaran bertambah
- Banyaknya warga yang sudah ber JKN minta dialihkan ke PYDOPD dengan alasan sudah tidak mampu bayar berdampak anggaran bertambah tapi tidak ada daya ungkit terhadap dashboard
- Segmen kepesertaan PBPU/BP dan PPU belum maksimal
- Gagal didaftarkan UHC karena dokumen kependudukan tidak valid

STRATEGI MEMPERTAHANKAN UHC KOTA BANDUNG

1. Pemberi kerja harus mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta JKN
2. Masyarakat mampu didorong menjadi peserta Mandiri /PBPU
3. Masyarakat miskin yang masuk BDT/DTSK di jaminkan PBI APBN
4. Masyarakat miskin belum masuk BDT/DTSK diajukan Dinsos masuk BDT/DTKS
5. Masyarakat belum punya JKN dan tidak mampu dijaminkan PYDOPD
6. Data PPU yang tidak valid diperbaiki